



Aparat Hukum Diminta Usut Janggal Haji 2024

Yaquut Kembali Dipanggil DPR

PANSUS khusus atau Pansus Haji DPR RI akan memanggil lagi Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas pada Senin (23/9) mendatang usai mangkir dari pemanggilan pada hari ini, Rabu (18/9).

Ia mengatakan pemanggilan pada Senin pekan depan sebagai pemanggilan ketiga dari Pansus Haji.

"InsyaAllah sore ini [panggilan] yang ketiga akan segera dikirim untuk hari Senin," kata Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB Marwan Jafar di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.

Marwan mengatakan, Yaquut tak hadir pada

pemanggilan kedua oleh Pansus Haji. Ia menilai Yaquut tak bisa mempertanggungjawabkan pelbagai keputusannya terkait haji di hadapan Pansus Haji terkait pelayanan haji 2024.

"Bagaimana tak integritasnya dan tidak ada moralitas dari Menteri Agama untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan," kata dia.

Marwan mengultimatum bakal menggandeng pihak penegak hukum untuk menyelidiki keberadaan Yaquut jika pada Senin pekan depan tak hadir.

■ Bersambung ke Hal 11

Jakarta, MIMBAR - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR dari Fraksi PKB Marwan Jafar mengungkapkan salah satu rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Pansus Haji yakni meminta aparat hukum untuk menyelidiki banyaknya kejanggalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

"Salah satunya kita merekomendasikan aparat hukum untuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan, ketidakberesan dalam pelaksanaan haji tahun 2024," kata Marwan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Meski begitu, Marwan mengatakan rekomendasi Pansus Haji tak cuma satu poin, melainkan ada beberapa poin lainnya.

Namun, ia enggan mengungkapkan rekomendasi lainnya. Sebab, Pansus Haji nantinya

akan mengumumkan pelbagai temuan, kesimpulan serta rekomendasi secara resmi pada Senin pekan depan.

"Maksimal tanggal 23 [September] kita harus sudah membuat kesimpulan. Karena tanggal 24 itu ada rapat Bamus untuk rapat paripurna, waktunya sudah habis," kata Marwan.

Di sisi lain, Marwan menjelaskan Pansus Haji tetap akan mengumumkan kesimpulan dan rekomendasi pada Senin pekan depan meski

■ Bersambung ke Hal 11



Produksi Padi Dunia Alami Masalah



Medan, MIMBAR - Bulog menyatakan produksi beras global tengah mengalami tantangan signifikan.

Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog Sonya Mamoriska Harahap menyebut masalah ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan beras. Maklum, beras merupakan salah satu bahan makanan pokok.

"Kita sedang menghadapi masa penuh tantangan yang mengancam stabilitas dan keamanan tanaman

pangan penting ini. Saat ini, produksi padi dihadapkan pada serangkaian masalah yang berdampak luas pada masyarakat lokal dan sistem pangan global," ujar Sonya saat membuka Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Badung, Kamis (19/9).

Dia menjelaskan salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh produksi beras global adalah perubahan iklim.

■ Bersambung ke Hal 11

EROS DJAROT:

Jokowi Sudah Tidak Sehat



Jakarta, MIMBAR - Rakyat sudah jengah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka bahkan sudah berani lantang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Demikian antara lain disampaikan budayawan Eros Djarot dalam mencermati dinamika sosial di masyarakat jelang berakhirnya

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

16 RABIUL AWAL 1446 H

Subuh : 05:01 WIB	Maghrib : 18:25 WIB
Zuhur : 12:22 WIB	Isya : 19:34 WIB
Ashar : 15:25 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Peringatan Jokowi di Penghujung Masa Jabatan AI Bisa Lenyapkan 85 Juta Pekerjaan 2025

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) diprediksi menggerus hingga 85 juta jenis pekerjaan pada 2025 mendatang.

Hal itu selaras dengan Laporan Survei Pekerjaan Masa Depan dari Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2020.

"Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analytic. Setiap hari muncul hal-hal baru," kata Jokowi saat membuka Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

"Kalau kita baca, 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta. Pekerja akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil,"



imbuhnya.

Jokowi menyebut otomasi itu menjadi salah satu faktor semakin menipisnya lapangan kerja baik di Indonesia maupun global di masa depan. Ia kemudian merinci

dua tantangan lainnya.

Pertama, perlambatan ekonomi global. Ia menyebut Bank Dunia mencatatkan pertumbuhan global

■ Bersambung ke Hal 11

Bjorka Bocorkan Data NPWP Jokowi

Medan, MIMBAR - Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu, kembali beraksi karena diduga membocorkan jutaan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Setidaknya ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah.

■ Bersambung ke Hal 11

Hidayah

Diskriminasi Islam

Oleh Dr A Rasyid, MA

PERSOALAN besar dihadapi umat Islam dunia saat ini yang berada di negara-negara non Muslim salahsatu persoalan diskriminasi. Umat Islam sering kali menghadapi prasangka negatif yang mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan mereka dengan masyarakat sekitar.

Beberapa negara menerapkan kebijakan yang membatasi praktik ibadah, seperti larangan terhadap jilbab atau tempat ibadah. Tindakan diskriminatif dapat berujung pada serangan fisik, vandalism terhadap

■ Bersambung ke Hal 11

■ Apa masih ada cawe2...
■ Hehehe...

KBRI Beirut Siapkan Evakuasi

Beirut, MIMBAR - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut, Lebanon, sudah menyiapkan proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari negara tersebut.



Rencana evakuasi ini sudah disiapkan sejak konflik Israel dan kelompok milisi Hizbullah memanas sejak 4 Agustus lalu, hingga serangkaian ledakan pager hingga walkie talkie di Lebanon pekan ini.

Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Beirut, Yosi Aprizal, mengatakan sejauh ini KBRI Beirut sudah mengevakuasi 25 WNI, sejak pemerintah RI menetapkan status Siaga I di Lebanon.

"Sejauh ini sudah 25 orang kita evakuasi dan sedang kita persiapkan evakuasi berikutnya," kata Kuasa Usaha Ad-Interim KBRI Beirut, Yosi Aprizal, kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/9).

Yosi merinci ada 147 WNI yang saat ini masih berada di Lebanon. Ratusan WNI itu mayoritas menetap di ibu kota Beirut. Sementara itu, WNI yang merupakan pelajar kebanyakan berada di Tripoli dan Bekaa. Menurut Yosi, saat ini

para WNI dalam kondisi baik dan tak ada yang menjadi korban ledakan pager maupun perangkat elektronik lainnya.

"Alhamdulillah, dalam pantauan kami semua WNI dalam kondisi baik. Catatan kami masih ada 147 WNI di Lebanon," kata Yosi.

Ribuan pager dan perangkat elektronik di Lebanon meledak secara serentak dalam dua hari berturut-turut sejak Selasa (17/9).

Total ada 12 orang tewas dan 2.800 orang terluka akibat ledakan pager pada Selasa. Sementara itu, sebanyak 20 orang tewas dan 450 lainnya terluka imbas ledakan berbagai perangkat elektronik, umumnya walkie-talkie, pada Rabu.

Rentetan ledakan tersebut terjadi di pinggiran Beirut selatan yang dikenal Dahiyeh hingga wilayah timur lembah Bekaa. Wilayah-wilayah ini merupakan markas kelompok milisi Hizbullah.

Korban ledakan pager sebagian besar anggota Hizbullah. Namun, beberapa di antaranya juga termasuk warga sipil seperti anak-anak hingga petugas medis. Duta Besar Iran untuk Lebanon juga turut menjadi korban luka serangan ini.

Hizbullah menuding Israel dalam di balik ledakan-ledakan ini. Kelompok itu bersumpah akan membalas Israel atas teror berdarah tersebut.

Israel sejauh ini tak bicara gamblang mengenai ledakan di Lebanon. Namun Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut soal "era baru" dalam perang yang dilakukan Negeri Zionis.

"IDF membawa prestasi luar biasa, bersama dengan Shin Bet, bersama dengan Mossad, semua badan dan semua kerangka kerja dan hasilnya adalah hasil yang sangat mengesankan," kata Gallant saat berkunjung ke pangkalan Angkatan Udara Ramat-David di Israel utara, Rabu (18/9). (cnni/js)

Jokowi Sudah...

Dari Halaman 1

pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. "Rakyat tidak bodoh, sekarang realitanya masyarakat sudah berani mengatakan, 'sudah cukup Pak Jokowi, kita sudah tidak bisa dibohongi anda lagi'. Semua yang saya pelajari nadanya sama," kata Eros Djarot dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, Kamis (19/9).

Selama ini, rakyat telah berharap banyak kepada Presiden Joko Widodo untuk memberi teladan yang baik. Namun faktanya, harapan rakyat bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Sorry sir, i don't trust you anymore. Yang diharapkan oleh rakyat, presiden memberi contoh, menjadi teladan, bukan meneladani yang tidak-tidak," kritiknya.

AI Bisa...

Dari Halaman 1

hanya berada di 2,7 persen dan diprediksi pada 2024 turun menjadi 2,6 persen.

Kedua, gig economy atau ekonomi serabutan yang menurutnya perlu diwaspadai. Pasalnya, di masa depan, perusahaan menurutnya bisa saja lebih menyenangi freelancer ketimbang merekrut pekerja tetap. "Sehingga sekali lagi, kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang," kata dia.

Lebih lanjut, Jokowi

Sebagai Kepala Negara, pernyataan Jokowi yang kerap menjadi kebijakan justru tidak menunjukkan konsistensi.

"Yang namanya sabdo pandito ratu, kalau sudah 'tak' (berucap) sudah jadi (kebijakan). Jangan ngomongnya A di situ tahunya B, nanti B jadinya C. Kan rakyat bingung," jelasnya.

Melihat ketidakkonsistensian Jokowi, Eros Djarot menilai wajar jika belakangan muncul aspirasi untuk menurunkan Jokowi dari kursi kekuasaan. "Orang yang mempunyai akal sehat, budi pekerti sehat, pasti menganggap Pak Jokowi dalam keadaan yang tidak sehat. Jadi memang sudah parah. Kalau umpamanya minta seperti itu (turun dan diadili), itulah realita suara rakyat yang murni," tutupnya. (rm/j)

Sebagai Kepala Negara, pernyataan Jokowi yang kerap menjadi kebijakan justru tidak menunjukkan konsistensi.

"Perubahan ini tak hanya mengganggu musim tanam, tetapi juga memperburuk kelangkaan air yang jadi sumber daya penting untuk menanam padi," tuturnya.

Selain iklim, produksi beras juga berhadapan dengan ancaman biologis yang datang dari hama tanaman. Ia mengatakan hama, penyakit, dan spesies invasif yang mengganggu tanaman padi semakin sulit dikelola.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak menghadiri panggilan. Ia menilai Yaqut banyak melanggar undang-undang dalam pelaksanaan Haji 2024.

"Tetapi Pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak undang-undang," ujar Marwan.

Tak hanya itu, Marwan mengatakan terdapat unsur dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan haji 2024. Ia menilai salah satu dugaan pelanggaran terkait kuota tambahan Haji sebesar 20 ribu kuota yang diberikan Arab Saudi. Baginya, ada dugaan jika kuota tambahan itu dijual.

"Dari 20 ribu yang 10 ribu dialihkan ke haji khusus. Ini jelas-jelas melanggar Undang-undang pelaksanaan haji dan umrah. Sudah jelas ini," kata dia.

Terlebih, Ia menilai Pansus menemukan banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. "Nah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan menyangkut tentang Undang-Undang

Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya. "NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.

Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan

router wi-fi mereka atau mengeluarkan baterai dari perangkat tertentu," kata Bulos kepada CNN.

"Benar-benar ada ketakutan terhadap benda-benda yang mereka miliki di rumah," lanjutnya.

Menurut Bulos, warga Lebanon khawatir akan ada serangan lainnya di negara mereka pada Kamis, usai ledakan perangkat elektronik terjadi selama dua hari berturut-turut.

Lebanon diguncang ledakan maut usai ribuan pager dan alat-alat elektronik seperti walkie-talkie, radio, hingga perangkat tenaga surya meledak secara serentak selama dua hari berturut-turut. Ledakan itu terjadi pada Selasa (17/9) dan Rabu (18/9).

Total ada 12 orang tewas dan 2.800

Usai Rentetan Ledakan Maut, Warga Lebanon Dihantui Ketakutan

Lebanon, MIMBAR - Warga di seantero Lebanon dihantui ketakutan usai rentetan perangkat elektronik meledak hingga menewaskan puluhan orang dan melukai ribuan lainnya.

Nabih Bulos, seorang jurnalis Timur Tengah (Timteng) yang menjabat kepala biro Timteng Los Angeles Times mengatakan kepada CNN bahwa masyarakat Lebanon saat ini jadi waswas dengan alat-alat komunikasi yang biasa mereka gunakan sehari-hari.

Berbagai rumor bermunculan yang menyuruh orang-orang untuk segera mematikan perangkat mereka.

"Sekadar memberi Anda gambaran mengenai rumor yang kami dengar, ada banyak pesan yang beredar yang meminta orang-orang untuk mematikan

Sonya menerangkan cuaca tak menentu, kenaikan suhu, dan cuaca ekstrem berdampak pada hasil panen padi dunia.

Selain iklim, produksi beras juga berhadapan dengan ancaman biologis yang datang dari hama tanaman. Ia mengatakan hama, penyakit, dan spesies invasif yang mengganggu tanaman padi semakin sulit dikelola.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak menghadiri panggilan. Ia menilai Yaqut banyak melanggar undang-undang dalam pelaksanaan Haji 2024.

"Tetapi Pansus sudah mempunyai kesimpulan bahwa dia melanggar banyak undang-undang," ujar Marwan.

Tak hanya itu, Marwan mengatakan terdapat unsur dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan haji 2024. Ia menilai salah satu dugaan pelanggaran terkait kuota tambahan Haji sebesar 20 ribu kuota yang diberikan Arab Saudi. Baginya, ada dugaan jika kuota tambahan itu dijual.

"Dari 20 ribu yang 10 ribu dialihkan ke haji khusus. Ini jelas-jelas melanggar Undang-undang pelaksanaan haji dan umrah. Sudah jelas ini," kata dia.

Terlebih, Ia menilai Pansus menemukan banyak penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. "Nah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 dan menyangkut tentang Undang-Undang

Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya. "NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.

Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan

router wi-fi mereka atau mengeluarkan baterai dari perangkat tertentu," kata Bulos kepada CNN.

"Benar-benar ada ketakutan terhadap benda-benda yang mereka miliki di rumah," lanjutnya.

Menurut Bulos, warga Lebanon khawatir akan ada serangan lainnya di negara mereka pada Kamis, usai ledakan perangkat elektronik terjadi selama dua hari berturut-turut.

Lebanon diguncang ledakan maut usai ribuan pager dan alat-alat elektronik seperti walkie-talkie, radio, hingga perangkat tenaga surya meledak secara serentak selama dua hari berturut-turut. Ledakan itu terjadi pada Selasa (17/9) dan Rabu (18/9).

Total ada 12 orang tewas dan 2.800

orang terluka akibat ledakan pager pada Selasa. Sementara itu, 20 orang tewas dan 450 lainnya terluka imbas ledakan berbagai perangkat elektronik umumnya walkie-talkie pada Rabu.

Rentetan ledakan tersebut terjadi di pinggiran Beirut selatan yang dikenal Dahiyeh hingga wilayah timur lembah Bekaa. Wilayah-wilayah ini merupakan markas kelompok milisi Hizbullah.

Korban ledakan pager sebagian besar merupakan anggota Hizbullah. Namun, beberapa di antaranya juga termasuk warga sipil seperti anak-anak hingga petugas medis. Duta Besar Iran untuk Lebanon juga turut menjadi korban luka serangan ini.

Hizbullah menuding Israel dalam di balik ledakan-ledakan ini. Seorang

Jubir Yaqut, Selasa 17/9 kemarin merilis laporannya, bahwa Yaqut sedang berada di Jeddah, Saudi Arabia, untuk merumuskan persiapan haji 2025 dengan pihak kerajaan Saudi.

Kata Marwan, "Kita masih menunggu ya, kehadiran beliau. Karena hari ini tidak hadir, besok kita panggil, sudah dilayangkan suratnya. Panggilan kedua. Kalau panggilan kedua tidak hadir. Maka indikasi tidak kooperatif itu sudah mulai kelihatan."

Karena berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, Marwan mengatakan, rapat dengan Menag seharusnya dilakukan antara tanggal 18, 19, hingga 20 September. Setelah itu, masuk dalam tahap kesimpulan.

"Kesimpulan. Kita setelah selesai nanti kita laporkan ke pimpinan DPR, sikap menteri yang tidak hadir ini seperti apa sikapnya, nanti pimpinan DPR yang akan mengambil langkah-langkah," tuturnya. (bes/js)

MPR, DPR, DPRD dan DPD. Maka sebetulnya nanti kalau pemanggilan ketiga tidak hadir, itu kita bisa menggandeng Kepolisi Republik Indonesia untuk menjemput paksa ketidakhadiran ini," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto sebelumnya mengatakan Yaqut kemungkinan besar tak bisa menghadiri pang-

gilaan Pansus Haji karena menjalankan tugas kenegaraan ke luar negeri.

"Ada panggilan untuk tanggal 18 [September] tapi kemungkinan enggak bisa, karena mewakili bertugas untuk bersiap aktivitas MRI di Italia, terus persiapan haji di Arab Saudi," kata Cak Nanto kepada CNNIndonesia.com, Senin (16/9) malam. (cnni/js)

Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi," cuit Falcon Feeds.

Merespons dugaan insiden ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Rabu (18/9). (cnni/js)

Produksi Padi...

"Menambah beban bagi petani yang sudah menghadapi kompleksitas perubahan iklim," katanya.

Di tengah tantangan itu, kebutuhan pangan masyarakat global juga dihantui ketegangan dan konflik geopolitik yang melanda beberapa belahan dunia belakangan ini, seperti di Timur Tengah dan Rusia. Konflik itu mengganggu stabilitas pasar dan harga beras.

"Mengganggu jalur produksi dan distribusi. Akibatnya, jutaan orang yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok menghadapi kerentanan yang lebih besar terhadap kerawanan pangan," ujar dia.

Aparat Hukum...

Dari Halaman 1

ABAIKAN PANGGILAN DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Haji DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (18/9) kemarin nekat mengabaikan panggilan Rapat Pansus Haji, dengan alasan perjalanan dinas.

"Ya hari ini kita jadvalkan untuk kehadiran Menteri Agama, Pak Yakut, dan sudah kita layangkan surat panggilannya kemarin. Dan hari ini sudah dapat jawaban, mereka menyampaikan bahwa Menteri Agama ada perjalanan dinas," kata Marwan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 19 September 2024.

Namun, pihaknya telah kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada adik Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf itu untuk hadir dalam persidangan Pansus Haji, untuk mengonfirmasi seluruh keterangan dari pejabat dan saksi.

Yaqut Kembali...

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus Haji DPR RI Marwan Dasopang, mengatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (18/9) kemarin nekat mengabaikan panggilan Rapat Pansus Haji, dengan alasan perjalanan dinas.

"Ya hari ini kita jadvalkan untuk kehadiran Menteri Agama, Pak Yakut, dan sudah kita layangkan surat panggilannya kemarin. Dan hari ini sudah dapat jawaban, mereka menyampaikan bahwa Menteri Agama ada perjalanan dinas," kata Marwan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 19 September 2024.

Namun, pihaknya telah kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada adik Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf itu untuk hadir dalam persidangan Pansus Haji, untuk mengonfirmasi seluruh keterangan dari pejabat dan saksi.

Bjorka Bocorkan...

Dari Halaman 1

harga US\$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar. "Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna," demikian bunyi keterangan Bjorka dalam forum gelap tersebut.

Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

"Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat

Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi," cuit Falcon Feeds.

Merespons dugaan insiden ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman.

"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Rabu (18/9). (cnni/js)



Hidayah

Diskriminasi Islam

Dari Halaman 1

masjid, dan ancaman terhadap komunitas Muslim.

Umat Islam sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau akses ke layanan publik karena nama, penampilan, atau latar belakang mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak Muslim menghadapi diskriminasi di sekolah, baik dalam bentuk bullying maupun pengucilan.

Mengatasi diskriminasi ini memerlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk dialog antaragama, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung keberagaman.

Upaya mengatasi diskriminasi di kalangan umat Muslim dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam melalui program pendidikan yang menjelaskan ajaran Islam dan menyoroti kontribusi positif umat Muslim.

Kemudian mendorong interaksi dan dialog antara

berbagai komunitas agama untuk membangun saling pengertian dan menghormati perbedaan.

Disamping itu melakukan kerjasama dengan organisasi hak asasi manusia untuk memperjuangkan kebijakan yang melindungi hak-hak umat Muslim dan melawan diskriminasi.

Meningkatkan keterlibatan komunitas Muslim dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi untuk memperkuat suara mereka. Mendorong representasi yang lebih baik dan positif tentang umat Islam di media untuk melawan stereotip dan prasangka.

Tidak kalah pentingnya juga umat Islam mengadakan program yang membantu membangun solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat dan mengurangi ketegangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan diskriminasi terhadap umat Muslim dapat berkurang dan hubungan antarbudaya dapat diperkuat. (*)